

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TA 2025 KANWIL PAPUA BARAT

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	RENCANA AKSI	TIMELINE RENAKSI (TRIWULAN)
A	Bagian TU dan Umum						
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	22.585.916.000	<p>1. Perencanaan</p> <p>Melakukan Penyusunan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum</p> <p>Melakukan Monitoring Capaian RO pada setiap DIPA di Kanwil Hukum setiap triwulan, termasuk kendala dan alternatif solusi apabila tidak tercapai target RO yang telah ditetapkan</p> <p>Sinkronisasi Laporan target CRO dengan Penginputan CRO didalam Sakti</p> <p>Melakukan Monitoring Alokasi Anggaran sesuai dengan besaran SBKU dan SBKK yang ditetapkan</p> <p>Melakukan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko</p> <p>Melakukan Penyusunan Laporan SPIP</p> <p>Melakukan Evaluasi Capaian PK Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Hukum Papua Barat</p> <p>2. Keuangan</p> <p>Menyusun Laporan Keuangan Semester</p> <p>Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal</p> <p>3. Pengelolaan BMN</p> <p>Pengamanan BMN Satuan Kerja</p> <p>Penyusunan Laporan BMN</p>	<p>III dan IV</p> <p>I, II, III dan IV</p> <p>I, II, III dan IV</p> <p>I, II, III dan IV</p> <p>III dan IV</p> <p>III dan IV</p> <p>I, II, III dan IV</p> <p>II dan IV</p> <p>II dan IV</p> <p>I, II, III dan IV</p> <p>II dan IV</p>

						4. Kehumasan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kanwil	I, II, III dan IV
							Melakukan peliputan dan publikasi kehumasan Kanwil Kementerian Hukum	I, II, III dan IV
							Evaluasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kantor Wilayah	II dan IV
							Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kanwil	I, II, III dan IV
							Tindak Lanjut Pengaduan (sosial media/e-lapor) Kanwil	I, II, III dan IV
						5. SDM	Evaluasi Pengelolaan Kearsipan	II dan IV
							Pemusnahan Arsip	IV
							Membuat usulan kebutuhan diklat bagi pegawai	I dan III
							Penanganan Hukuman Disiplin Pegawai	I, II, III dan IV
							Melaksanakan orientasi ASN baru Kanwil Kementerian Hukum	I
							Melaksanakan Analisa Kebutuhan Pegawai Kantor Wilayah	II
B	Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum							TRIWULAN
1	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %	505.000.000		Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	I, II, III dan IV
		Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan	6 Orang			Kegiatan Sosialisasi Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah	IV

			Perundang-undangan					
2	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	127.589.000	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum	III	
			Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen		Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	IV	
3	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	765.106.000	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah	II dan IV	
			Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi		82%	Pelaksanaan pembiayaan bagi permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang disampaikan OBH	I, II, III dan IV
				Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi		80%	Pelaksanaan pembiayaan bagi permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang disampaikan OBH	I, II, III dan IV
			Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah		70%	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan / Pembentukan Kelompok Kadarkum / Desa / Kelurahan Binaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	II dan IV
4	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemanfaatan	Persentase rekomendasi	80%	291.047.000	Melaksanakan Analisis kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUM	I, II, III	

		rekomen-dasi strategi kebijakan hukum di wilayah	strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti			Monitoring IPK-IKM	III	
						Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum	IV	
C	Divisi Pelayanan Hukum						TRIWULAN	
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	1.961.271.000	Kegiatan Sosialisasi Layanan Fidusia	I	
						Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan	II	
						Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan	III	
						Melaksanakan Kegiatan Forum Grup Discusion (FGD) Layanan Kenotariatan	IV	
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90 %		Pemeriksaan terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh MPW	I, II, III dan IV	
2	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	1.835.625.000	Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	I, II, III dan IV	
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%		Diseminasi Desain Industri	I, II, III dan IV	
						Diseminasi KI	I, II, III dan IV	
						Pelaksanaan Agenda RuKI (Guru Kekayaan Intelektual)	I, II, III dan IV	
			Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%		Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual	I, II, III dan IV	